

2025

Laporan Keberlanjutan

SUSTAINABILITY REPORT



BPR HARTA MANDIRI

PT. BPR HARTA MANDIRI

PT. BPR Harta Mandiri

Daftar Isi

Daftar Isi	<i>i</i>
Kata Pengantar	<i>ii</i>
1. Pendahuluan dan Strategi Keberlanjutan	
2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Keberlanjutan	7
2.1. Kinerja Ekonomi	7
2.2. Kinerja Lingkungan Hidup	10
2.3. Kinerja Sosial	11
2.4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	13
3. Profil Bank	15
4. Penjelasan Direksi	19
5. Tata Kelola Keberlanjutan	28
Umpan Balik	33

Kata Pengantar

Pada tahun 2025, BPR Harta Mandiri telah melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025 sesuai POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. BPR Harta Mandiri menerapkan program-program kerja yang disusun dalam RAKB sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

BPR (Bank Perekonomian Rakyat) menegaskan pentingnya mengelola keuangan secara berkelanjutan dengan menitikberatkan pada prinsip "triple bottom line" *triple bottom line* yang menekankan *people* (kesejahteraan masyarakat), *profit* (keuntungan) dan *planet* (lingkungan hidup) dalam semua kegiatan usaha Bank, dengan menyesuaikan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST).



BPR Harta Mandiri berperan sebagai penghubung yang menyalurkan dana pihak ketiga (DPK) dan menugaskan dana tersebut ke bentuk kredit bagi masyarakat. Maka dari itu, lembaga ini harus selektif dalam meminjamkan dana kepada calon debitur, menolak proyek yang dapat merusak lingkungan, serta memfokuskan pada debitur yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial sekaligus menghasilkan keuntungan dari bunga. (*intermediary institution*) Selama prosesnya, BPR harus melakukan penilaian ketat terhadap potensi dampak lingkungan dan sosial setiap permohonan kredit, sehingga setiap pinjaman mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

BPR Harta Mandiri berkomitmen mengintegrasikan Keuangan Berkelanjutan sebagai upaya kolaboratif dalam sektor jasa keuangan untuk mendukung Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TBP) sekaligus melindungi keberlanjutan bank sendiri. Kurangnya perhatian terhadap isu lingkungan dan sosial dapat memperbesar risiko perbankan, terutama risiko kredit akibat gagal bayar debitur yang merugikan lingkungan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. *(default)* Debitur yang menjalankan usaha dengan dampak negatif pada lingkungan berkontribusi secara kontraproduktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Keberlanjutan (SR - *Sustainability Report*) BPR Harta Mandiri Tahun 2024 menyajikan informasi kinerja keberlanjutan Bank di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial kepada semua pemangku kepentingan. BPR Harta Mandiri, dengan modal inti kurang dari Rp 50 milyar, sesuai ketentuan OJK, pertama kali menyusun Laporan Keberlanjutan pada tahun 2025, yakni Laporan Keberlanjutan Tahun 2024, yang wajib disampaikan ke OJK secara luring (offline) paling lambat sesuai batas waktu penyampaian Laporan Tahunan yang berlaku. Dengan demikian, BPR Harta Mandiri menyiapkan Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 yang memuat informasi untuk periode pelaporan 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025.

Laporan keberlanjutan ini disusun mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 yang mengatur Penerapan Keuangan Berkelanjutan serta Pedoman Teknis Pedoman Teknis ini ditujukan bagi bank untuk menerapkan POJK No. 51/POJK.03/2017.

1.

Pendahuluan dan Penjelasan Strategi Keberlanjutan

Tentang Laporan Keberlanjutan



Sesuai POJK No. 51 /POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan pasal 10 secara substantif mewajibkan BPR/ BPRS untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya. Untuk itu BPR/BPRS wajib menyusun dan **menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) atau SR (Sustainability Report) Tahun 2025 ke OJK paling lambat tanggal 30 April 2026** bersamaan dengan Laporan Tahunan BPR/BPRS Tahun 2025.

Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Mengacu pada Lampiran 2 POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan bahwa format penulisan Laporan Keberlanjutan sebagai berikut:

1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan
2. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup)
3. Profil Singkat BPR/BPRS
4. Penjelasan Direksi

5. Tata kelola keberlanjutan
6. Kinerja keberlanjutan
7. Verifikasi tertulis dari pihak independen
8. Lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca dan
9. Tanggapan BPR/BPRS terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.



Acuan dan Standar Penyusunan Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan BPR Harta Mandiri tahun 2024 disusun dengan mengkomodir standar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Laporan Keberlanjutan ini tidak lepas dari laporan tahunan yang telah disusun dengan laporan keuangan teraudit untuk tahun buku 2024. BPR Harta Mandiri membuat dan melaporkan kinerja keberlanjutan dalam periode 1 (satu) tahun buku (tahunan) mulai tahun 2024 ini. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keberlanjutan BPR Harta Mandiri tahun 2025 ini memuat data dan informasi yang dikumpulkan dalam 1 (satu) tahun yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Prinsip penetapan konten dalam Laporan ini didasarkan pada POJK 51/POJK.03/2017 dan disusun berdasarkan 2 prinsip, yaitu prinsip isi dan kualitas.

Prinsip isi meliputi:

1. Konteks berkelanjutan: Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) ini disusun sejalan dengan konteks keuangan berkelanjutan.
2. Kelengkapan: Informasi disajikan sebagai informasi kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan kelengkapan bagi pembaca.

Prinsip kualitas adalah:

1. Keseimbangan: Informasi terkait capaian dan prestasi, serta tantangan disampaikan sesuai dengan kondisi Bank.
2. Komparabilitas: Data yang disampaikan dalam laporan disajikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Akurasi: Angka dan informasi telah diperiksa secara internal Bank sehingga diyakini akurasinya.
4. Ketepatan waktu: Laporan ini disajikan tepat waktu bersama dengan Laporan Tahunan.
5. Kejelasan: Informasi yang disajikan dalam laporan mudah untuk dipahami.

Topik material dalam Laporan ini adalah topik-topik yang telah diprioritaskan oleh organisasi untuk dicantumkan dalam laporan. Dimensi yang digunakan untuk menentukan prioritas, antara lain, adalah dampak bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak dalam Laporan ini termasuk di dalamnya yang bernilai positif. Penetapan aspek material dan batasan didasarkan pada isu-isu yang berpengaruh signifikan bagi BPR Harta Mandiri serta seluruh pemangku kepentingan.

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, BPR mengacu pada 8 (delapan) prinsip keuangan berkelanjutan, dan 3 (tiga) prioritas sesuai POJK No. 51/2017. Delapan prinsip keuangan berkelanjutan yang dikembangkan oleh BPR Harta Mandiri adalah:

1. **Investasi yang bertanggung jawab;** adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam keputusan investasi yang bertujuan agar dapat mengelola risiko secara lebih baik. Kami menerapkan prinsip ini melalui pemberian kredit yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dengan menganalisis potensi risiko yang ditimbulkan dari usaha yang dibiaya oleh Bank.
2. **Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan;** Kami menerapkan prinsip ini dengan menuangkannya pada kebijakan keberlanjutan yang dituangkan dalam dokumen RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) yang menjadi landasan BPR Harta Mandiri dalam menjalankan bisnis berkelanjutan di kegiatan usaha Bank.
3. **Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup;** Kami telah memiliki prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dalam mengukur risiko yang dikelola dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) Bank. Selain risiko-risiko finansial, kami juga melakukan proses manajemen risiko khususnya mengukur risiko pemberian kredit atau pinjaman yang bersentuhan langsung dengan aspek sosial dan lingkungan hidup, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
4. **Prinsip Tata Kelola;** Kami menerapkan tata kelola keberlanjutan (ekonomi, lingkungan dan sosial) yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip penerapan GCG (*Good Corporate*

Governance), yaitu transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan kewajaran.

5. **Prinsip Komunikasi yang Informatif;** Kami menyediakan laporan yang informatif mencakup strategi, tata kelola, kinerja dan prospek Bank yang dapat dengan mudah diakses oleh para *stakeholder* melalui situs web BPR Harta Mandiri <https://www.bprgodigital.co.id>
6. **Prinsip Inklusif;** Bank menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/ atau jasa yang dapat dengan mudah diakses oleh nasabah. Bank memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang mudah dan merata terhadap layanan yang keuangan BPR Harta Mandiri.
7. **Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas ;** Dalam menyusun program keberlanjutan, kami mempertimbangkan sektor-sektor unggulan prioritas yang telah kami tetapkan dalam RAKB (Rencana Aksi Keuangan Bank). Hal ini kami lakukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan mendukung program pemerintah dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.
8. **Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi;** Kami membuka diri untuk berkomunikasi dan berkerja sama dengan lembaga atau pemerintahan setempat terkait Bisnis Berkelanjutan dalam rangka penyelarasan strategi keberlanjutan Bank. Hal ini terlihat dari keanggotaan perusahaan pada perbarindo dan partisipasi dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang memberdayakan masyarakat.



Sedangkan **tiga prioritas RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)** adalah:

1. Pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, antara lain mengidentifikasi dan memonitor portofolio pembiayaan Bank yang menunjang keuangan berkelanjutan.
2. Pengembangan kapasitas internal Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan meningkatkan *awareness* mengenai keuangan berkelanjutan (untuk pegawai dan nasabah), implementasi

- keuangan berkelanjutan pada sektor-sektor usaha yang menjadi fokus Bank.
3. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/ atau standar prosedur operasional, antara lain menyiapkan kebijakan Keuangan Berkelanjutan, penyesuaian kebijakan internal Bank lainnya seperti Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian, Kebijakan tata kelola keberlanjutan.



Strategi Keberlanjutan

Strategi keuangan berkelanjutan disusun berdasarkan pertimbangan visi dan misi Bank dalam implementasi keuangan berkelanjutan. Bagi Bank, penerapan keuangan berkelanjutan bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, namun juga sebagai strategi untuk mewujudkan visi Bank khususnya dalam penerapan prinsip inklusi keuangan.

Segmen UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang menjadi sasaran utama Bank dalam pelayanan jasa keuangan diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi. Selain itu, melalui pengembangan produk dan/ atau jasa keuangan berwawasan lingkungan, Bank berupaya meningkatkan peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs - *Sustainable Development Goals*). Hal ini diwujudkan dalam berbagai

upaya, di antaranya dengan menyusun rencana kerja, dan mengembangkan RAKB sesuai dengan ketentuan regulator.

Sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab dan Lingkungan Perseroan Terbatas, BPR Harta Mandiri mulai menerapkan prinsip-prinsip *go green company* sejak penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan menjalankan kegiatan-kegiatan diantaranya :

1. Mengampanyekan efisiensi penggunaan air di toilet yang berada di lingkungan kantor BPR dengan memasang pamflet “Gunakan air seperlunya”, “Hemat air”, atau “Matikan air setelah selesai digunakan”.
2. Mengampanyekan lingkungan kerja menjadi lebih sehat dengan motto “BERSIH itu SEHAT” dengan memasang pamflet di tempat-tempat yang mudah terlihat. .
3. Menjalankan program “Hemat Energi” dengan pembatasan penggunaan AC dan listrik setelah jam kerja dan mematikan lampu di ruangan yang tidak digunakan.
4. Program penggunaan *tumbler* sebagai pengganti gelas air minum atau air dalam kemasan.



2.

Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Keberlanjutan

1. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Ekonomi

Perbandingan Target dan Kinerja Keuangan, Portofolio, Pendapatan dan Laba Rugi

Keterangan	2025	2024	2023
Kinerja Keuangan			
Total Aset	34.741.726.178	28.911.188.001	32.935.967.040
Aset Produktif	33.030.661.909	27.822.916.367	32.959.842.302
Kredit/Pembiayaan Bank	22.934.782.856	23.167.529.966	21.502.065.065
Dana Pihak Ketiga	15.469.018.324	13.049.533.791	18.389.778.190
Pendapatan Operasional	6.072.190.581	5.345.314.613	5.879.157.413
Beban Operasional	4.260.393.688	4.400.166.519	4.265.457.554
Laba Bersih	1.631.961.623	989.209.725	1.377.170.610
Rasio Kinerja (Dalam %)			
Rasio Kecukupan Modal Minimum (KPMM)	80,42	66,67	72,99
Rasio Modal Inti Terhadap Aset Produktif Bermasalah Netto (MIAPB)	428,73	354,44	420,08
Rasio Aset Likuid Thdp Total Aset	20,09	10,36	10,28
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap aset produktif	0	0	0
NPL gross	18,21	20,74	17,68
NPL nett	15,87	17,04	14,24
Return on Asset (ROA)	5,79	3,43	5,72
Kualitas Aktiva Produktif (KAP)	12,01	16,63	9,44
Net Interest Margin (NIM)	16,10	15,53	14,72
Rasio Efisiensi (BOPO)	70,16	82,32	72,55
Loan to Deposit Ratio (LDR)	148,48	181,78	116,92
Cash Ratio	43,86	22,96	18,30

BPR Harta Mandiri di sepanjang tahun 2023, 2024 dan 2025 masih mendapatkan laba

Kinerja Aspek Ekonomi terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Jumlah Jenis produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan				
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan	-	-	-	-
a.1. DPK	-	-	-	-
a.2. Surat Berharga	-	-	-	-
a.3. Lainnya	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan	-	-	-	-
b.1. Kredit / Pembiayaan	-	-	-	-
b.2. Surat Berharga	-	-	-	-
b.3. Lainnya	-	-	-	-
Outstanding produk dan/atau jasa yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan (Dalam Satuan Rupiah Penuh)				
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan	-	-	-	-
a.1. DPK	-	-	-	-
a.2. Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-
a.3. Lainnya	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan	-	-	-	-
b.1. Kredit / Pembiayaan	-	-	-	-
b.2. Surat Berharga yang dimiliki	-	-	-	-
b.3. Lainnya	-	-	-	-
Total Outstanding DPK (Rp)	-	-	-	-
Total Nominal Surat Berharga yang diterbitkan (Rp)	-	-	-	-
Total Outstanding Kredit Kepada Pihak Ketiga (Rp)	-	-	-	-
Total Nominal Surat Berharga yang dimiliki (Rp)	-	-	-	-

Persentase Total Portofolio Kegiatan Usaha Berkelanjutan terhadap Total Portofolio (%)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Penghimpunan Dana Berkelanjutan				
a.1. DPK	-	-	-	-
a.2. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-
b. Penyaluran Dana Berkelanjutan (Kredit)				
b.1. Kredit / Pembiayaan	-	-	-	-
b.2. Surat Berharga yang dimiliki	-	-	-	-

Total outstanding kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (Rp)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Energi Terbarukan	-	-	-	-
b. Efisiensi Energi	-	-	-	-
c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi	-	-	-	-
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	-	-	-	-
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-	-	-
f. Transportasi Ramah Lingkungan	-	-	-	-
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	-	-	-	-
h. Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-	-
i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Ecoefficient)	-	-	-	-
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	-	-	-	-
k. Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	-	-	-	-
l. Kegiatan UMKM	3.000.000.000	2.368.056.725	601.901.554	-
Total outstanding kredit/ pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (total a - l)	3.000.000.000	2.368.056.725	601.901.554	-

2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan dan Kinerja Lingkungan Hidup

Kegiatan Internal dan Kegiatan TJSL



PT. BPR Harta Mandiri sudah mulai menerapkan pelestarian lingkungan hidup melalui penghematan pemakaian kertas di kantor untuk dapat digunakan bolak balik. Pemakaian listrik dengan melakukan penghematan mematikan lampu diruangan yang tidak ada aktivitas dan Penggunaan air dengan hemat.

Dukungan Pada Kelestarian Lingkungan Hidup Bagi Bank

Perusahaan juga menerapkan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan termasuk mengganti penggunaan gelas plastik dengan *tumbler* yang disiapkan pegawai masing-masing.

Penggunaan Energi (antara lain Air dan Listrik)

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Penggunaan Bahan Bakar	38.304.873	38.304.873	85.823.322	49.874.760
b. Penggunaan Listrik	47.985.845	47.985.845	48.074.867	40.669.134
c. Penggunaan Air	1.876.000	1.876.000	733.000	2.122.000
d. Penggunaan alat tulis kantor	7.026.466	7.026.466	7.781.933	7.096.608

Total Emisi

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Scope 1 (Ton CO2)	-	-	-	-
b. Scope 2 (Ton CO2)	-	-	-	-
c. Scope 3 (Ton CO2)	-	-	-	-
c.1. Financed Emission (Ton CO2)	-	-	-	-
c.2. Non-Financed Emission (Ton CO2)	-	-	-	-
d. Pengurangan Emisi (Ton CO2)	-	-	-	-
Total Emisi Scope 1,2,3 (a + b + c - d)	-	-	-	-
Total Limbah Dibuang (Ton CO2)	-	-	-	-
Kegiatan Pelestarian Keanekaragaman Hayati (Satuan Rupiah)	-	-	-	-

3. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan, Kinerja Sosial dan Keuangan Inklusi

Komitmen Perusahaan dan Kinerja Keuangan Inklusi

PT. BPR Harta Mandiri melakukan optimalisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan kepentingan karyawan. PT. BPR Harta Mandiri juga senantiasa memperhatikan komposisi karyawan sesuai dengan kebutuhan operasional.

Perkembangan Laku Pandai

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
a. Jumlah Agen Laku Pandai	-	-	-	-
b. Jumlah Kepemilikan Rekening Tabungan (Basic Saving Account)	-	-	-	-
c. Jumlah Kepemilikan Rekening Kredit yang melalui referral Agen Laku Pandai	-	-	-	-

Kinerja Sosial Terhadap Ketenagakerjaan

BPR memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai dengan memberikan pengupahan/ penggajian sesuai dengan standar UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) di kota Pekanbaru

Kinerja Aspek Sosial Terkait Inklusivitas Ketenagakerjaan Internal Bank

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Jumlah Pegawai Bank	20	20	18	17
Jumlah Direksi dan Komisaris (Total Jumlah Pria dan Wanita)	2	2	2	2
Jumlah Direksi dan Komisaris Pria	1	1	2	2
Jumlah Direksi dan Komisaris Wanita	1	1	-	-
Jumlah Pegawai Difable	-	-	-	-

Kinerja Sosial Terhadap Masyarakat

PT. BPR Harta Mandiri mengikuti setiap perubahan dan tantangan penerapan keuangan berkelanjutan melalui berbagai penyesuaian di dalam kegiatan usaha dengan terus berupaya untuk menginterpretasikan aspek-aspek keberlanjutan tersebut ke dalam kegiatan usaha dan strategi perbankan dengan tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan tetapi juga berkontribusi mengurangi dampak negative lingkungan dan sosial dari kegiatan operasional.

PT. BPR Harta Mandiri memastikan bahwa pelaksanaan CSR tetap berjalan sebagai wujud tanggungjawab sosial dengan turut mendukung kegiatan budidaya terumbu karang. Seiring dengan meningkatnya isu-isu keberlanjutan dan risiko lingkungan hidup, sosial dan tata kelola (LST) PT. BPR Harta Mandiri mencermati beberapa tantangan kedepan yang perlu dikelola yaitu :

1. Peningkatan risiko lingkungan terutama perubahan iklim yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha BPR;
2. Penyusunan produk yang ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan keuangan berkelanjutan.

Kinerja Aspek Sosial Terkait Dana Kegiatan Sosial Serta Keanggotaan Pada Asosiasi

Keterangan	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Realisasi Dana Untuk Kegiatan Sosial (Satuan Rupiah)	6.500.000	6.500.000	7.000.000	8.989.800
Jumlah Keanggotaan pada Asosiasi	1	1	1	1

4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Inovasi dan Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Sebagai entitas bisnis, BPR Harta Mandiri senantiasa berupaya agar eksistensinya semakin maju dan berkembang. Salah satunya adalah dengan melakukan inovasi dan pengembangan produk dan layanan dengan memperhatikan perkembangan teknologi terkini yang sangat pesat sebagai faktor pendorong pergeseran perilaku masyarakat modern yang menginginkan kemudahan, rasa aman dan kenyamanan dalam bertransaksi perbankan.

Dalam melakukan inovasi, BPR Harta Mandiri melakukannya dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Jumlah dan Persentase Produk dan Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan

Semua produk dan jasa yang ditawarkan BPR Harta Mandiri telah memenuhi semua persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga telah teruji keamanannya bagi nasabah. Selaras dengan itu, untuk menekan risiko kerugian seminimal mungkin atas produk dan jasa tersebut, BPR Harta Mandiri secara kontinyu menyampaikan informasi atas semua risiko yang mungkin terjadi kepada nasabah, seperti risiko pasar dan risiko fluktuasi mata uang. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai saluran, formulir Ringkasan Informasi Produk maupun secara tatap muka.

Sejalan dengan itu, sesuai regulasi yang ada, BPR Harta Mandiri juga melakukan kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan secara berkala sehingga calon nasabah atau nasabah mendapatkan pemahaman yang benar tentang produk/ jasa yang ditawarkan Perseroan. Dengan demikian, mereka akan melakukan investasi sesuai kebutuhan dan telah mengetahui profil risiko yang melekat di dalam produk/jasa tersebut.

Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan

BPR Harta Mandiri telah melakukan penilaian terhadap setiap produk/ jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan dan mengacu pada Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dalam POJK Keuangan Berkelanjutan, maka BPR Harta Mandiri akan memberikan dana dengan memegang prinsip kehati-hatian, termasuk mencegah risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. Upaya itu membawa hasil dengan tidak adanya dampak negatif atas produk dan jasa yang dikeluarkan BPR Harta Mandiri pada tahun pelaporan.

Jumlah Produk yang Ditarik Kembali dan Alasannya

Tidak ada produk yang ditarik atas pertimbangan internal BPR Harta Mandiri maupun perintah dari regulator (OJK).

Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Sepanjang tahun 2025 tidak ada komplain dari nasabah atau masyarakat terhadap produk dan jasa Bank yang merusak lingkungan hidup dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Profil Bank

Informasi Umum Perusahaan	
Nama Perusahaan	PT BPR Harta Mandiri
Alamat	Jl. ir h Juanda no. 11 Pekanbaru
Nomor Telepon	(0761) 856756
Email	bpr.harta.mandiri@gmail.com
Website	www.bprhartamandiri.com

Skala Usaha Bank

Total Aset dan Kewajiban

*dalam ribuan rupiah

Uraian	2025	2024	2023
Aset	34.741.726	28.911.188	32.935.967
Kewajiban	442.099	304.395	119.464
Dana Pihak Ketiga	15.469.018	12.745.138	18.389.778

Jumlah pegawai

PT. BPR Harta Mandiri melakukan optimalisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan kepentingan karyawan. PT. BPR Harta Mandiri juga senantiasa memperhatikan komposisi karyawan sesuai dengan kebutuhan operasional.

No	Jenis Kelamin	2025	2024	2023
1.	Pria	12 orang	10 orang	9 orang
2.	Wanita	10 orang	10 orang	8 orang
Jumlah		22 orang	20 orang	17 orang

Persentasi Kepemilikan Saham

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nominal	Kepemilikan (%)
1	Sim Eng Lian	3.200	3.200.000.000	40%
2	Suainie	4.000	4.000.000.000	50%
3	Jansen Lingga	800	800.000.000	10%
Jumlah		8.000	8.000.000.000	100%



Produk dan Layanan

PRODUK DAN LAYANAN KEGIATAN USAHA

1. Simpanan

a) Tabungan

1) Tabungan Harta

Tabungan Harta adalah simpanan pihak ketiga pada PT. BPR Harta Mandiri diperuntukkan kepada perorangan, kelompok maupun badan hukum yang berada dalam wilayah kerja BPR (Wilayah Riau Daratan) tetapi tidak terbatas pada masyarakat di luar wilayah kerja BPR. Apabila calon penabung adalah anak-anak (belum tergolong dewasa) serta belum mempunyai identitas diri, maka permohonan harus diketahui oleh seseorang yang tergolong dewasa dan mempunyai hubungan jelas dengan calon penabung seperti orang tua/wali. Menabung di PT. BPR Harta Mandiri aman dan dijamin oleh LPS, mendapatkan Bunga, Pengelolaan dan

pencatatan dana secara detail, dan tabungan harta tidak memiliki atm sehingga tabungan tidak dengan mudah diambil sewaktu- waktu.

2) Tabunganku

Tabunganku adalah adalah produk simpanan untuk nasabah perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan diperuntukkan kepada perorangan, kelompok maupun badan hukum. Apabila calon penabung adalah anak-anak (belum tergolong dewasa) serta belum mempunyai identitas diri, maka permohonan harus diketahui oleh seseorang yang tergolong dewasa dan mempunyai hubungan jelas dengan calon penabung seperti orang tua/wali

Tabunganku Bebas biaya administrasi, setoran awal ringan, aman karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (lps) dan tabunganku tidak memiliki atm sehingga tidak dengan mudah diambil sewaktu- waktu serta dapat membantu untuk menentukan tujuan keuangan menjadi lebih baik

3) Tabungan Sejahtera

Tabungan Sejahtera adalah tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan atau kelompok dengan persyaratan mudah dan ringan, bunga setara deposito yang penyetoran dapat dilakukan pada waktu kapan saja namun penarikan tabungan dilakukan setelah 1 tahun guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bunga tabungan sejahtera setara bunga deposito, Bebas biaya administrasi, setoran awal ringan, aman karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (lps) dan Tabungan Sejahtera tidak memiliki atm sehingga tidak dengan mudah diambil sewaktu- waktu serta dapat membantu untuk menentukan tujuan keuangan menjadi lebih baik.

b) Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat- syarat tertentu diperuntukkan kepada perorangan, kelompok maupun badan hukum yang berada dalam wilayah kerja BPR (Wilayah Riau Daratan) tetapi tidak terbatas pada masyarakat di luar wilayah kerja BPR.

Karakteristik deposito antara lain adalah:

- 1) Deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir.
- 2) Deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis atau automatic roll over (ARO).
- 3) Deposito dalam mata uang rupiah.
- 4) Apabila calon nasabah adalah anak-anak (belum tergolong dewasa) serta belum mempunyai identitas diri, maka permohonan harus diketahui oleh seseorang yang tergolong dewasa dan mempunyai hubungan jelas dengan calon nasabah seperti orang tua/wali.

2. Kredit

a) Kredit Modal Kerja

b) Kredit Investasi

c) Kredit Kolektif

Profil Singkat dan Nilai Keberlanjutan Bank

a. Visi Keberlanjutan

Menjadi Bank yang memiliki daya saing dalam pelayanan dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup

b. Misi Keberlanjutan

1. Mewujudkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat
2. Pengembangan kapasitas internal Bank yang sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan
3. Membangun Tata Kelola dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko khususnya aspek sosial dan lingkungan hidup

c. Keanggotaan Pada Asosiasi Regional hingga Nasional

Menjadi anggota Perbarindo (Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat)

Penjelasan Lainnya

BPR Harta Mandiri mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan.

4. Penjelasan Direksi

Penjelasan Direksi

Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

Bank berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai keberlanjutan dengan menjadi Bank yang terpercaya dan unggul dalam memberikan kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*. Nilai keberlanjutan tersebut diimplementasikan melalui strategi utama dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang selaras dengan kebutuhan strategis, integrasi aspek sosial dan lingkungan hidup ke dalam pengelolaan risiko, serta peningkatan pertumbuhan portofolio kredit atau pembiayaan pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan, khususnya sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Sektor UMKM merupakan usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu, dan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia khususnya menyerap tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.



Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Sebagai upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*, BPR menetapkan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) dengan rencana 5 (lima) tahun sebagai Rencana Aksi dalam Jangka Panjang. Selain itu, Bank juga memiliki Rencana Aksi dalam Jangka Pendek (satu tahun) yang ditetapkan di tahun 2024.

Target yang ditetapkan oleh Bank yaitu pegawai telah mengikuti sosialisasi Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan menerapkan operasional Perbankan Hijau.

Laporan Keberlanjutan ini berisi komitmen, strategi dan kinerja pencapaian kami terkait Keuangan Berkelanjutan. Adapun komitmen kami adalah:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha terutama dalam pemberian kredit.
2. Menjalankan operasional Bank yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
3. Pengembangan kompetensi staf pada pemahaman terhadap sosial dan lingkungan hidup serta penerapannya dalam setiap kegiatan usaha Bank.
4. Menerapkan perbankan yang inklusif dengan menyediakan dukungan akses keuangan bagi segenap masyarakat.
5. Berpartisipasi dalam upaya bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Strategi Pencapaian Target

Bank senantiasa meningkatkan strategi keberlanjutan khususnya dalam memitigasi risiko yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan usaha Bank. Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, BPR tidak terlepas dari berbagai risiko di antaranya risiko pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun, risiko tersebut telah dikelola secara optimal oleh Bank dengan

berbagai upaya mitigasi yang dilakukan.

Tantangan utama saat ini di awal peletakan pondasi batu pertama keuangan berkelanjutan adalah komunikasi dan membuat para pemangku kepentingan sadar akan pentingnya penerapan keuangan berkelanjutan dalam operasional dan bisnis perusahaan. Namun demikian, kami sangat percaya bahwa ke depannya terdapat peluang penyaluran dana yang besar terkait dengan Keuangan Berkelanjutan.

Selama tahun 2025, BPR Harta Mandiri belajar untuk menjadi lebih baik dalam layanan keuangan berkelanjutan. Kami berharap adanya kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah, regulator dan asosiasi untuk menciptakan nilai tambah bagi ekonomi, lingkungan dan sosial dalam upaya mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BPR Harta Mandiri kedepannya akan terus menargetkan implementasi keuangan berkelanjutan, antara lain peningkatan pengetahuan semua jenjang organisasi mengenai keuangan berkelanjutan, menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada lingkungan dan sosial dalam operasional keseharian, mengembangkan produk keuangan berkelanjutan dan pada akhirnya meningkatkan portofolio produk keuangan berkelanjutan.

Dalam merealisasikan keuangan berkelanjutan, perlu adanya harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta permasalahan lingkungan lainnya yang menjadi tanggung jawab kita semua. Kami berpartisipasi memberikan kontribusi dalam mengurangi dampak negatif lingkungan dan sosial dari dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional dan bisnis kami.



Apresiasi

BPR memberikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bersama-sama berkontribusi dalam penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan di BPR Harta Mandiri.

Dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami, menjadi kekuatan kami untuk mampu memberikan dan menciptakan nilai keberlanjutan bagi semua pihak. Harapan kami adalah seluruh pemangku kepentingan dapat terus memberikan dukungan serta kerja samanya agar kami mampu tumbuh secara berkelanjutan dan kerjasama yang baik dalam mengelola isu-isu keberlanjutan.

Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi dari Sisi Internal

1. Fokus Bisnis Bank

Kendala dalam implementasi **keuangan berkelanjutan** pada BPR Harta Mandiri seringkali berhubungan dengan kemampuan internal organisasi untuk beradaptasi dari fokus laba instan menjadi perkembangan yang menyeluruh, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Triple bottom line).

2. Operasional Bank

Dilihat dari sudut pandang operasional BPR Harta Mandiri, kesulitan utama dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan terletak pada bagaimana prinsip-prinsip ESG (*Environmental, Social and Governance*) atau LST (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola) diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses pemberian kredit, pelayanan kepada nasabah, hingga penyusunan laporan. Seringkali, terdapat perbedaan signifikan antara kebijakan yang tertulis dan implementasinya di lapangan.

3. Kebijakan Internal

BPR Harta Mandiri belum sepenuhnya memiliki pedoman internal yang secara jelas dan komprehensif untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam Kebijakan dan Prosedur Pemberian Kredit, Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko, maupun Kebijakan Penerapan Tata kelola.

4. Keahlian SDM Bank

1. **BPR Harta Mandiri menyadari bahwa belum ada SDM yang ditugaskan sebagai spesialis ESG (*Environmental, Social and Governance*) atau *Sustainability Officer*.** Fungsi ini biasanya dirangkap oleh Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang juga memiliki beban kerja besar dan perangkapan jabatan.
2. **Kemampuan identifikasi risiko lingkungan dan sosial.** Analisis kredit umumnya dilatih untuk membaca laporan keuangan dan arus kas, namun belum terbiasa menilai potensi pencemaran, keselamatan kerja, konflik sosial, atau kepatuhan usaha terhadap regulasi lingkungan hidup.

5. Lainnya

Tantangan lainnya yang tidak kalah beratnya adalah **profil dan kesiapan debitur**. Mayoritas nasabah BPR berasal dari segmen mikro dan kecil yang umumnya belum memiliki kesadaran atau kemampuan untuk menerapkan praktik usaha ramah lingkungan. Banyak usaha masih informal, sehingga sulit menyediakan dokumen legalitas, izin lingkungan, atau bukti pengelolaan limbah.

Upaya yang dilakukan

Bagi BPR Harta Mandiri menyadari bahwa penerapan keuangan berkelanjutan bukan sekedar memenuhi POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan, tetapi bagaimana membuat prinsip tersebut **realistis dijalankan dengan kapasitas Bank yang relatif terbatas**.

Karena itu, upaya yang dicoba dilakukan oleh dilakukan bersifat bertahap, praktis, dan menyesuaikan profil nasabah UMKM. Langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen manajemen

Direksi dan Dewan Komisaris menetapkan arah strategis melalui kebijakan, rencana aksi, serta penyediaan sumber daya. *Tone from the top* (sikap, tindakan, dan perilaku etis dari pemimpin tertinggi organisasi dewan direksi, manajemen senior) penting agar seluruh unit memahami bahwa keberlanjutan adalah bagian dari strategi bisnis, bukan sekedar proyek tambahan

2. Penyusunan kebijakan dan prosedur yang sederhana

BPR menerjemahkan prinsip ESG ke dalam panduan praktis, misalnya daftar sektor yang dibatasi, klasifikasi risiko rendah-tinggi, serta *checklist* singkat bagi account officer. Pendekatan ini membuat implementasi lebih mudah diterapkan.

3. Peningkatan kapasitas SDM

Dilakukan melalui pelatihan rutin, workshop studi kasus UMKM, serta pembekalan cara identifikasi risiko lingkungan dan sosial yang relevan dengan kondisi lapangan.

4. Integrasi ke proses kredit

Aspek keberlanjutan mulai dimasukkan dalam tahap analisis, persetujuan, hingga monitoring. Tidak harus rumit, tetapi cukup memastikan adanya pertimbangan dampak lingkungan dan sosial.

5. Pengembangan produk dan insentif

Misalnya pemberian suku bunga atau persyaratan yang lebih baik bagi usaha yang menjalankan praktik ramah lingkungan, pengelolaan limbah, atau efisiensi energi.

6. Peningkatan kualitas data dan pelaporan

Walaupun sistem IT terbatas, BPR dapat memulai dengan *template* manual atau penandaan portofolio untuk memudahkan kompilasi data secara bertahap.

7. Edukasi dan pendampingan nasabah

Karena banyak debitur belum memahami isu keberlanjutan, bank dapat memberikan sosialisasi ringan mengenai manfaat praktik usaha yang lebih bertanggung jawab.

8. Kerja sama dengan pihak eksternal

BPR dapat menggandeng dinas pemerintah, komunitas UMKM, atau lembaga pendamping guna membantu penilaian maupun pembinaan debitur.

9. Implementasi bertahap berbasis prioritas

Implementasi Keuangan Berkelanjutan pada BPR Harta Mandiri tidak harus langsung sempurna. Fokus dapat dimulai dari sektor dengan risiko tinggi atau peluang hijau yang paling memungkinkan di wilayah kerja.

Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi dari Sisi Eksternal**1. Kebijakan Pemerintah**

Dari sisi eksternal, khususnya yang bersumber dari **kebijakan dan lingkungan regulasi pemerintah dan regulator**, BPR Harta Mandiri sering menghadapi dinamika yang tidak sederhana dalam menerapkan keuangan berkelanjutan. Walaupun arah kebijakan nasional mendorong praktik ESG, penerjemahannya pada bank berskala kecil seperti BPR membutuhkan penyesuaian yang cukup besar.

Beberapa tantangan yang umum dirasakan antara lain berikut.

1. Perubahan dan perkembangan regulasi yang cepat.

Ketentuan mengenai keuangan berkelanjutan, pelaporan, maupun klasifikasi kegiatan hijau terus berkembang. BPR perlu waktu untuk memahami, menafsirkan, dan menyesuaikan proses internalnya.

2. Kebutuhan pelaporan yang semakin detail.

Permintaan data portofolio berkelanjutan sering memerlukan pemetaan sektor dan informasi debitur yang belum tentu tersedia. Bagi BPR dengan infrastruktur terbatas, ini menjadi beban tambahan.

3. Standar yang cenderung mengacu pada praktik bank umum.

Sebagian pedoman dirancang dengan asumsi kapasitas bank besar, sehingga implementasinya pada BPR memerlukan penyederhanaan atau interpretasi khusus.

2. Perekonomian Nasional, Regional, dan Global

Secara garis Besar BPR Harta Mandiri menghadapi tantangan secara eksternal dan jika dipetakan menjadi hal-hal sebagai berikut sesuai pada gambaran pada masing-masing level di bawah ini.

Tingkat Nasional

Di tingkat nasional, isu utama biasanya berkaitan dengan struktur ekonomi dan kesiapan pelaku usaha.

Pertama, **ketergantungan pada sektor tertentu** yang belum sepenuhnya ramah lingkungan. Peralihan menuju praktik yang lebih hijau membutuhkan biaya dan waktu, sehingga permintaan pembiayaan berkelanjutan belum tumbuh cepat.

Kedua, **kesenjangan literasi dan kapasitas UMKM**. Sebagian besar pelaku usaha masih fokus pada keberlangsungan bisnis jangka pendek sehingga investasi pada teknologi atau proses yang lebih berkelanjutan belum menjadi prioritas.

Tingkat Regional (daerah/wilayah)

Pada level regional, variasi kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur sangat memengaruhi.

Banyak daerah menghadapi **keterbatasan akses teknologi hijau**, minimnya konsultan atau lembaga pendukung, serta belum berkembangnya rantai pasok yang berkelanjutan.

Selain itu, **prioritas pembangunan daerah** sering masih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja cepat, sehingga aspek lingkungan belum selalu menjadi pertimbangan utama.

Kualitas data dan pengawasan lingkungan antar daerah juga bisa berbeda, menyulitkan lembaga keuangan untuk melakukan penilaian yang seragam.

Tingkat Global

Di tingkat global, tekanan datang dari perubahan standar, pasar, dan risiko lintas negara.

Ada **peningkatan tuntutan terhadap transparansi dan standar ESG internasional**, yang terus berkembang dan memerlukan penyesuaian.

Fluktuasi ekonomi dunia, perubahan harga komoditas, dan risiko perubahan iklim menimbulkan **ketidakpastian investasi**.

Selain itu, muncul risiko **akses pendanaan internasional** yang semakin mensyaratkan kepatuhan pada prinsip keberlanjutan tertentu.

Secara keseluruhan, tantangan pada tiga level ini saling terkait. Kondisi global memengaruhi kebijakan nasional, lalu diterjemahkan secara berbeda di tiap daerah. Lembaga keuangan, termasuk BPR, berada di tengah dinamika tersebut.

3. Lainnya

1. **Ciri khas dan kematangan nasabah.** Sebagian besar debitur BPR datang dari kalangan usaha mikro dan kecil yang pemahaman lingkungannya masih terbatas. Banyak bisnis yang belum berizin, belum memiliki standar pengelolaan limbah, atau praktik kerja yang terdokumentasi dengan baik. Hal ini menyulitkan bank dalam mengumpulkan informasi untuk mengevaluasi aspek keberlanjutan.
2. **Pandangan dan penolakan dari pihak peminjam.** Persyaratan tambahan atau pertanyaan terkait pengaruh terhadap lingkungan dapat dianggap sebagai penghalang dalam mendapatkan pinjaman. Apabila tidak diatasi dengan tepat, hal ini berpotensi mengurangi ketertarikan calon debitur.

Upaya yang dilakukan

Untuk menghadapi tantangan eksternal dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan, BPR Harta Mandiri menempuh langkah seperti meningkatkan komunikasi dengan regulator, mengikuti forum industri/perbarindo, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dengan pendekatan yang paling realistis sesuai kapasitas.

Berikut beberapa upaya yang lazim ditempuh oleh BPR Harta Mandiri antara lain:

1. **Edukasi dan literasi kepada nasabah.**
BPR dapat melakukan sosialisasi sederhana mengenai praktik usaha yang lebih aman bagi lingkungan, manfaat legalitas, serta potensi efisiensi biaya. Pendekatan persuasif ini membantu mengurangi resistensi ketika bank mulai menanyakan aspek ESG.
2. **Pendampingan UMKM.**
Tidak cukup hanya meminta dokumen; bank membantu debitur memahami apa yang perlu diperbaiki. Misalnya arahan pengelolaan limbah sederhana, keselamatan kerja, atau cara memperoleh izin usaha.
3. **Membangun kemitraan lokal.**
Kerja sama dengan dinas pemerintah daerah, koperasi, komunitas UMKM, atau lembaga pendamping dapat membantu penyediaan informasi teknis dan pembinaan tanpa seluruh beban ada pada bank.
4. **Mengembangkan produk yang realistis dengan pasar.**
Daripada menunggu proyek hijau besar, BPR dapat mendorong pembiayaan yang berdampak sederhana namun nyata, seperti pembiayaan terhadap Kegiatan UMKM, efisiensi energi, pertanian ramah lingkungan, atau pengurangan limbah.
5. **Peningkatan komunikasi dengan regulator.**
Melalui forum industri atau asosiasi, BPR dapat memperoleh klarifikasi, berbagi praktik baik, serta menyampaikan kendala lapangan sehingga implementasi lebih sesuai dengan kapasitas.

6. Penyederhanaan persyaratan.

Agar tidak menghambat minat debitur, bank dapat menggunakan checklist atau klasifikasi risiko yang proporsional terhadap skala usaha.

7. Penguatan reputasi dan komunikasi publik.

Dengan menunjukkan komitmen pada pembiayaan yang bertanggung jawab, bank dapat membangun kepercayaan masyarakat dan menarik nasabah yang sejalan.

5. Tata Kelola Keberlanjutan

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan

Tata Kelola yang Baik (GCG - *Good Corporate Governance*) bagi Bank merupakan suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan 5 (lima) Pilar Tata Kelola, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Selain itu, GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika perbankan.

Kebijakan Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik, adalah sebagai berikut:

1. RUPS: adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/ atau Anggaran dasar.
2. Dewan Komisaris; adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar.

Dalam penerapan *good corporate governance*, Perseroan telah memiliki kerangka kerja (*framework*) yang menggabungkan tiga hal yaitu Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*) dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*). Kerangka kerja dan operasional ini diharapkan mampu memberikan hasil berupa perwujudan ekspektasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara berkesinambungan.

1. Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan

mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atas Kebijakan Keuangan Berkelanjutan yang merupakan salah satu kebijakan spesifik Bank.
2. Memberikan persetujuan terhadap RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.

2. Direksi

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi terkait dengan penerapan program Keuangan Berkelanjutan mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengusulkan rancangan kebijakan Keuangan Berkelanjutan berikut perubahannya kepada Dewan Komisaris.
2. Menyusun dan mengusulkan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) kepada Dewan Komisaris.
3. Menyusun dan mengusulkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) kepada Dewan Komisaris.
4. Mengkomunikasikan RAKB kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank.
5. Memantau Pejabat Eksekutif satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Keuangan Berkelanjutan.



Sebagai BPR (Bank Perekonomian Rakyat) yang memiliki modal inti di bawah Rp 50 milyar, BPR Harta Mandiri berkomitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Penerapan keuangan berkelanjutan di BPR Harta Mandiri secara umum menjadi tanggung jawab Direktur Utama sebagai pemimpin tertinggi di BPR Harta Mandiri. Namun, dalam pelaksanaannya, Direktur Utama telah menugaskan Direktur Yang Membawahkan Fungsi (YMF)

Kepatuhan yang membawahi Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai koordinator Tim Implementasi Keuangan Berkelanjutan yang bertugas melakukan penyusunan, monitoring, dan penyampaian atas penerapan keuangan berkelanjutan.

Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan penyampaian hasil pelaksanaan atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dalam bentuk Laporan Berkelanjutan dilakukan oleh Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai Koordinator Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan.

Adapun tugas dan tanggung jawab **Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan** adalah sebagai berikut:

Ketua (Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan):

1. Memastikan bahwa Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan dan Unit Kerja Pengelola telah melaksanakan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bersama- sama dengan Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan merekomendasikan hasil penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan hasil pemantauan Keuangan Berkelanjutan kepada Direksi sebelum disetujui oleh Dewan Komisaris.

Koordinator (Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko):

1. Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan dan seluruh anggota Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan serta Unit Kerja terkait hal- hal sebagai berikut: (a) Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB); (b) Pemantauan penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan (c) Penyusunan Laporan Berkelanjutan;
2. Menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tugas dan tanggung jawab tersebut pada butir (i) di atas kepada Ketua Tim, Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
3. Menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Berkelanjutan sebelum batas akhir penyampaian sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Struktur Organisasi dan Pengendalian Internal

Struktur Organisasi dan Pengendalian Internal

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah Unit Kerja yang menangani Keuangan Berkelanjutan dan Pengendalian Risiko Iklim	1	1	1
Jumlah SPO Manajemen Risiko terkait Keuangan Berkelanjutan	1	1	1

Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan***Program Pengembangan Bagi Internal Bank Pada Setiap Level Jabatan***

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Dewan Komisaris	1	1	1
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Direksi	1	1	1
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Pejabat Eksekutif	1	1	1
Jumlah Kegiatan Pengembangan untuk Pegawai	1	1	1

Pembekalan dilakukan melalui pemberian pelatihan yang dilakukan dan dihadiri oleh seluruh anggota Tim. Materi yang disampaikan mencakup prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dan kategori kegiatan yang tergolong sebagai KUB. Dengan demikian, Bank berharap dapat mengembangkan portofolio produk yang termasuk dalam kategori KUB di masa mendatang.

1. Sosialisasi Keuangan Berkelanjutan
2. Sosialisasi program kerja implementasi keuangan berkelanjutan



Identifikasi Risiko Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Bank berupaya untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko terkait aspek lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko Bank, melalui penyusunan kebijakan perkreditan maupun prosedur terkait portofolio produk yang termasuk dalam Kategori Usaha Berkelanjutan (KUB). Kebijakan dan prosedur tersebut telah menjadi bagian dari rencana strategis keuangan berkelanjutan Bank yang ditargetkan dapat tersedia pada tahun 2025.

Untuk memastikan setiap program dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, Bank akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Keterlibatan dan Penjelasan Terkait Pemangku Kepentingan

Pemegang Saham

Dalam penerapan **keuangan berkelanjutan**, peran pemegang saham di BPR Harta Mandiri menentukan arah strategis BPR melalui kewenangan dalam RUPS, penetapan target kinerja, Tingkat komitmen pemegang saham BPR Harta Mandiri yang tinggi mendorong BPR Harta Mandiri untuk lebih disiplin melaksanakan Keuangan Berkelanjutan.

Pemerintah

Peran pemerintah dalam penerapan **keuangan berkelanjutan di Bank Perekonomian Rakyat (BPR)** penting karena pemerintah bertindak sebagai pembuat kebijakan, regulator, sekaligus penggerak ekosistem pembangunan ekonomi. Melalui peran ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan BPR Harta Mandiri menerapkan prinsip keberlanjutan secara efektif tanpa mengabaikan kelangsungan usaha dan prinsip kehati-hatian.

Otoritas

OJK menerbitkan panduan teknis, contoh praktik, serta klasifikasi kegiatan usaha yang mendukung keberlanjutan. Materi ini membantu BPR Harta Mandiri menerjemahkan konsep ESG ke dalam prosedur operasional sehari-hari.

Akademisi

1. Dalam penerapan **keuangan berkelanjutan**, BPR Harta Mandiri menambah pengetahuan dan referensi dari para akademisi yang akan dijalankan bank sehingga memiliki pendasaran ilmiah dan dapat terus disempurnakan.
2. Akademisi juga menghasilkan riset dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan yang dapat menjadi rujukan bagi BPR Harta Mandiri dalam menyusun kebijakan.

Praktisi

BPR Harta Mandiri memahami pendekatan yang sudah terbukti berhasil, termasuk cara sederhana mengintegrasikan tanpa membebani operasional.

Pegawai

Dalam penerapan **keuangan berkelanjutan** di BPR Harta Mandiri, pegawai merupakan pelaku utama yang menentukan apakah kebijakan dapat berjalan atau hanya menjadi dokumen. Direksi dapat menetapkan strategi, namun pelaksanaan sehari-hari berada di tangan account officer, analis kredit, petugas operasional, manajemen risiko, hingga fungsi pendukung lainnya.

Nasabah

Dalam penerapan **Keuangan Berkelanjutan**, nasabah bukan hanya penerima Kredit / Pembiayaan, tetapi juga partner yang menentukan dampak nyata dari kegiatan bank terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Apa yang dilakukan nasabah setelah memperoleh kredit pada akhirnya membentuk kualitas portofolio keberlanjutan di BPR Harta Mandiri.

Lainnya

Asosiasi perbankan/ Perbarindo berperan sebagai wadah koordinasi dan berbagi praktik baik antar BPR.

Umpan Balik

Untuk terwujudnya komunikasi dua arah sekaligus penerapan evaluasi BPR Harta Mandiri yang bertujuan meningkatkan kualitas Laporan di masa mendatang, BPR Harta Mandiri menyediakan Lembaran Umpan Balik di bagian akhir Laporan Keberlanjutan ini. Dengan lembaran tersebut, diharapkan pembaca dan pengguna laporan ini dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan.

BPR Harta Mandiri memberikan akses informasi seluas- luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan, dan investor serta siapa saja yang memberikan umpan balik (*feedback*) mengenai laporan keberlanjutan ini dengan menghubungi:



Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 Milyar penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 ini belum mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan. Bank akan terus melakukan perbaikan agar dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi segenap pembaca.

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2024
PT. BPR HARTA MANDIRI**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2024 telah disusun sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 16 Maret 2026

PT. BPR Harta Mandiri

Disetujui oleh



Jansen Lingga
Direktur Utama

Diketahui oleh



Sim Eng Lian
Komisaris

LAPORAN DEMOGRAFI PEGAWAI PT. BPR Harta Mandiri TAHUN 2025

1. Demografi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

No	Level Organisasi	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
	Jumlah	12	10	12	100%

2. Demografi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Demografi			
		SMA	S1	Jumlah	Komposisi
	Jumlah	1	21	22	100%

3. Demografi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Demografi			
		Tetap	Tidak tetap	Outsourcing	Komposisi
	Jumlah	14	5	3	100%

4. Demografi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

No	Rentang Usia	Demografi			
		20-30	31-40	41-50	Komposisi
	Jumlah	7	12	3	100%

5. Demografi Pegawai Berdasarkan Generasi

No	Generasi	Demografi			
		Gen Z	Milenial	Baby boomer	Komposisi
	Jumlah	6	13	3	100%

Laporan Realisasi Program Kerja
Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025

No	Deskripsi Program Kerja	Rencana Pelaksanaan	Realisasi
1	<p><i>Penyelenggaraan sosialisasi tentang konsep dasar Keuangan Berkelanjutan</i></p> <p><i>Tujuan: Peningkatan awareness (penyadartahuan) tentang Keuangan Berkelanjutan</i></p> <p><i>Indikator Ketercapaian: Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 kali bagi seluruh pegawai.</i></p> <p><i>Sumber Daya yang Dibutuhkan: Dana dan sumber daya manusia</i></p> <p><i>Penanggung Jawab: Bagian SDM dan Kepatuhan</i></p>	<p><i>01 Jan 2025 s/d 31 Jan 2025</i></p>	<p><i>Telah disosialisasi</i></p>
2	<p><i>Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup</i></p> <p><i>Tujuan: Meningkatkan Awareness tentang Keuangan Berkelanjutan</i></p> <p><i>Indikator Ketercapaian: Peningkatan kesadaran pegawai terhadap lingkungan sekitar.</i></p> <p><i>Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM</i></p> <p><i>Penanggung Jawab: Kepatuhan</i></p>	<p><i>01 Mar 2025 s/d 31 Mar 2025</i></p>	<p><i>Telah dilakukan sosialisasi Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup.</i></p>

3	<p><i>Efisiensi Penggunaan Listrik</i></p> <p>Tujuan: Mengetahui kebiasaan dalam memanfaatkan energi</p> <p>Indikator Ketercapaian: Penghematan biaya listrik sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2023.</p> <p>Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM</p> <p>Penanggung Jawab: Bagian Umum</p>	<p>01 Apr 2025 s/d 30 Apr 2025</p>	<p>Telah dilakukan Efisiensi Penggunaan Listrik</p>
4	<p><i>Mengurangi Penggunaan Kertas</i></p> <p>Tujuan: Penghematan dan mendukung program go green</p> <p>Indikator Ketercapaian: Penghematan penggunaan kertas sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2023.</p> <p>Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM</p> <p>Penanggung Jawab: Bagian Operasional</p>	<p>01 Jul 2025 s/d 31 Jul 2025</p>	<p>Telah dilakukan Mengurangi Penggunaan Kertas</p>
5	<p><i>Penyusunan SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan</i></p> <p>Tujuan: Memiliki SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan</p> <p>Indikator Ketercapaian: SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan telah disetujui Direksi dan Dewan Komisari</p> <p>Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM</p> <p>Penanggung Jawab: Bagian Kepatuhan</p>	<p>01 Agt 2025 s/d 31 Agt 2025</p>	<p>Telah dilakukan Penyusunan SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan</p>

6	<p><i>Penggunaan Wadah minuman yang dapat digunakan</i></p> <p><i>Tujuan: Meminimalisir penggunaan wadah minum berbahan plastik Indikator Ketercapaian: Penurunan Penggunaan air minum kemasan Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM</i></p> <p><i>Penanggung Jawab: Bagian Keuangan</i></p>	<p><i>01 Nov 2025 s/d 31 Des 2025</i></p>	<p><i>Telah dilakukan Penggunaan Wadah minuman yang dapat digunakan</i></p>
---	---	---	---

<p>7 Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan</p> <p>Tujuan: Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan</p> <p>Indikator Ketercapaian: Ditunjuknya Unit Kerja yang mengelola dan/ atau mengkoordinasi seluruh aktivitas Keuangan Berkelanjutan.</p> <p>Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM</p> <p>Penanggung Jawab: <i>Bagian Operasional</i></p>	<p>01 Mei 2025 s/d 31 Mei 2025</p>	<p>Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan telah direalisasi</p>
--	--	--

Terima kasih atas kesediaan Bapak / Ibu / Saudara untuk membaca Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) PT. BPR Harta Mandiri ini. Guna meningkatkan kualitas dan kelengkapan Laporan Keberlanjutan pada tahun-tahun mendatang kami berharap kesediaan Bapak / Ibu / Saudara untuk mengisi Lembar Umpan Balik yang telah disiapkan di bawah ini, dan mengirimkannya kembali kepada kami.

1. Laporan Keberlanjutan ini telah menyediakan informasi mengenai berbagai hal yang telah dilaksanakan PT. BPR Harta Mandiri dalam pemenuhan kewajiban terhadap pengaturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Bank.

Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu

2. Materi Laporan ini telah memberikan informasi yang bermanfaat mengenai aspek kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan hidup pada PT. BPR Harta Mandiri.

Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu

3. Materi dalam Laporan Keberlanjutan ini, termasuk data dan informasi yang disajikan sudah cukup lengkap.

Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu

4. Data dan informasi yang diungkapkan mudah dipahami, lengkap, transparan, dan berimbang.

Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu

5. Data dan informasi yang disajikan berguna dalam pengambilan keputusan.

Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu

6. Laporan Keberlanjutan ini menarik dan mudah dibaca.

Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu

7. Informasi apa saja yang dirasakan kurang dan harus dilengkapi dalam Laporan Keberlanjutan di masa mendatang?

.....
.....

8. Mohon berikan saran dan komentar terhadap Laporan Keberlanjutan ini.

.....
.....

Profil Anda

Nama :
Pekerjaan :
Institusi/Perusahaan :
Kontak (telepon, e-mail) :

Kategori Pemangku Kepentingan

- Pemerintah Nasabah Karyawan Mitra Usaha
- Media Masyarakat LSM Lain-Lain

Saran dan tanggapan yang Anda berikan atas informasi yang disajikan dalam laporan ini mohon dikirim ke:

PT. BPR Harta Mandiri
JL. Ir. H. Juanda No.11 Pekanbaru
Telepon : (0761) 856756, (Hunting),32656
Website : www.bprhartamandiri.com
E-mail : bpr.harta.mandiri@gmail.com